

IPTeKS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM TINGKAT PENILAIAN KINERJA PADA KELURAHAN SINGKIL II MANADO

Ida Bagus Putu Fernando¹, Aldi Andrew Hunta², Stanley Kho Walandouw³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Kota Manado, 95115, Indonesia

E-mail: idabagusfernando@gmail.com

ABSTRACT

In a sub-district administration in singkil II, the implementation of accountability accounting is very influential and is needed in the current era, where the level of performance is very important to deal with any future problems. The average level of performance disclosure in this kelurahan is where accounting is needed, 4 of the 7 employees strongly agree on that, where the application of accounting accountability will be very helpful in the scope of the singkil II village office which has a very positive influence on all the people and especially the people in the kelurahan, and of course, behind all that there are leaders who are able to direct all of them into a village that is good in the eyes of the local government and the community.

Keywords : responsibility accounting and performance assessment

1. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatannya setiap pemerintah daerah harus memerlukan adanya model akuntansi terhadap kinerja, dimana semua itu sangat berguna untuk melakukan sebuah dorongan di mana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh model akuntansi terhadap kinerja suatu pemerintahan. Dalam pemerintah kelurahan singkil II pada penerapannya semua yang berkaitan dengan pengaruh akuntansi dalam kinerja mencakup tentang bagian dari sistem pelaporan keuangan yang ada pada kelurahan tersebut. Kinerja mereka sangat terbantu dengan adanya hal itu. Program kinerja menjadi kata kunci di berbagai organisasi seperti di pemerintahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pertanggung Jawaban. Proses penggabungan, penulisan dan penyajian laporan atas transaksi. Digunakan untuk membantu bendahara dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan biaya. sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab yang di tetapkan. Informasi akuntansi dikombinasikan dengan bendahara yang memiliki tanggung jawab dalam proses terjadinya informasi untuk dimintakan pertanggung jawaban kepada pihak yang berwenang. Akuntansi pertanggung jawaban juga dapat membantu seorang pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Penilaian Kinerja. Dalam Hessel Nogi (2005 : 174) yang dinyatakan oleh Larry D. Stout Mengungkapkan bahwa penilaian kinerja atau pengukuran organisasi yaitu alur mengukur dan mencatat capaian pelaksanaan kegiatan dalam proses meraih misi dilihat dari hasil akhir berupa jasa ataupun proses. Penilaian kinerja juga dapat membantu mengevaluasi dan menilai kemampuan, keterampilan, pencapaian serta pertumbuhan seorang karyawan.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang digunakan adalah berdasarkan Laporan pertanggung jawaban kegiatan sesuai dengan prosedur kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan.

3.2. Teknik penerapan Ipteks

Teknik ipteks yang diterapkan dalam Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap pemerintah daerah dalam tingkat penilaian kinerja pada kelurahan singkil II Manado yaitu akuntansi pertanggungjawaban yang meliputi akuntansi tradisional dan akuntansi aktivitas. Penilaian kinerja antara lain metode catatan prestasi dan *critical incident method*.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Kantor Kelurahan Singkil II merupakan instansi pemerintahan yang berada di Kecamatan Singkil Kota Manado, sedikit cerita kata singkil berasal dari kata singkli yang artinya alat untuk menyebrang. Dahulu orang-orang yang akan datang berkeburung di daerah singkil sering menyebut kata itu, sehingga di kenalilah daerah itu dengan nama singkil. Pada jaman penjajahan Belanda karena masalah bahasa sehingga penyebutan singkli berubah menjadi singkel oleh penjajahan Belanda dan akhirnya dengan seiring perkembangan akhirnya di kenal nama singkil. Kelurahan Singkil II pada mulanya adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Singkil yang di mekarkan pada tahun 2001 menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Singkil satu dan Kelurahan singkil dua, pemekaran Kelurahan singkil II pada mulanya di pimpin oleh lurah Jakobus Sasialang tahun 2001-2002, kemudian di ganti oleh lurah Paulus Budi tahun 2002-2004. Tahun 2004-2010 di pimpin oleh lurah Johanis Dompas SE, tahun 2010-2013 di pimpin oleh lurah Triputri s,sasia,SE, kemudian di ganti oleh lurah Noni Rompah, SE sampai sekarang. Kantor Kelurahan Singkil II di bangun 100% dari hasil swadaya murni dari masyarakat sendiri pada era pimpinan Johanis Dompas, SE sehingga masyarakat boleh menikmati akan pelayanan yang ada dari kantor yang bagunannya permanen. Kelurahan Singkil II itu sendiri terdiri dari 5 lingkungan.

4.2. Pembahasan

Accounting traditional. sebuah system akuntansi yang dibuat sedemikian rupa sehingga penampungan dan pelaporan biaya sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam instansi. Hal ini disebut tradisional karena masih menggunakan cara manual, yaitu pemanggilan dari masing-masing kelompok anggota. Sistem akuntansi ini memiliki manfaat sebagai dasar penyusunan anggaran, penilai kinerja manajer serta petanggungjawaban, dan sebagai pemativasi manajer (Tumbuan, 2013).

Akuntansi aktivitas. Sebuah sistem akuntansi yang dibentuk sehingga pelaporan biaya berpatokan pada aktivitas penambah nilai. Hal ini lebih maju karena tidak menggunakan pelaporan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan aktivitasnya. Akuntansi pertanggungjawaban aktivitas dapat bermanfaat untuk memungkinkan aktivitas dapat bermanfaat untuk memungkinkan aktivitas pengelolaan dan pemantauan efektivitas jadwal keuangan. Untuk mendapatkan laporan berdasarkan aktivitasnya, tentunya perusahaan membutuhkan suatu system akuntansi online yang dapat terhubung dengan banyak divisi, jurnal *software* akuntansi online, memiliki sistem akuntansi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk terhubung dan memiliki akses melakukan pemeriksaan akuntansi secara cepat, tidak hanya memberikan laporan keuangan secara akurat, jurnal juga dapat memberikan perhitungan biaya, pengiriman faktur dan pembayaran sesuai jadwal aktivitas keuangan usaha (Sriwidodo, 2010).

Metode catatan prestasi. Yaitu metode yang terhubung dengan peristiwa kritis dengan catatan disempurnakan contohnya kemampuan pemimpin dalam berbicara.

Critical Incident Method. Suatu metode yang pencatatannya mencakup semua peristiwa dalam tindakan bawahannya sehari-hari yang selanjutnya diproses kedalam buku catatan khusus (Satyawinata, 2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam sebuah instansi jika kita bekerja kita butuh namanya suatu tanggung jawab agar kita bias di percaya dalam hal ini akuntansi pertanggungjawaban di perlukan untuk sebuah data. Di kelurahan singkil II, masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang anggaran yang di tetapkan pemerintah untuk membantu masyarakat karena masyarakat butuh yang namanya sebuah transparansi di setiap pemerintahan dan pemerintah bisa menilai kinerja dari setiap pegawai yang ada di sebuah instansi tersebut dan pegawai maupun kepala kelurahan singkil II bisa lebih mementingkan masyarakat daripada keinginan pribadi.

5.2. Saran

Dengan begini para pegawai tidak akan melakukan sesuatu yang curang atau suatu hal yang tidak di inginkan agar masyarakat lebih bisa percaya kepada pemerintah dan pemerintah bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Kadek Novi. (2017). *Analisi Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Perusahaan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal EMBA. 7(1), 5-7.
- Fees, Warren Reeve. 2006. *Accounting "Pengantar Akuntansi"*. Edisi 21. Salemba Empat: Jakarta.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Cetakan ke-1. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.71 Tahun 2010 tentang SAP.
- Rena. (2012). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial*. Skripsi. Palembang: STIE MUSI.
- Republik Indonesia, UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, UU No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- Satyawinata, F. W. (2014). *Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Administrasi Negara. 6(2), 10-16.
- Simamora, Henry. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Ketiga. Duri:Star Gate Publisher.
- Sriwidodo, U. (2010). *Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi, 8(1).
- Tumbuan, R. R. (2013). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya*. Jurna EMBA. 1(3), 11-15.